

# PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MADRASAH

**Muhammad Nasir**

STAIN Samarinda Jl. KH. Abul Hasan 03 Samarinda  
e-mail:ozan99@yahoo.com

## **Abstract**

Education decentralization in Indonesia provides new atmosphere in managing and improving the school curriculum. The reason is that schools are provided with broad opportunity to manage education based on the school-based curriculum. In other words, the authority to manage education-which was formally under the Centre Government-is recently under the authority of each school. It is in this context that the Government of Indonesia through the National Education Department views that there should be autonomy for schools to managing curriculum.

إن اللامركزية التربوية في إندونيسيا تأتي لنا بـجو جديد في إدارة وتطوير المناهج الدراسية في المدارس الإسلامية بالإضافة إلى فرض المناهج الذاتية الدراسية فيها و علاوة على اتخاذ القرار بشأن تطوير المناهج نفسها مما هو كان مركزيا إلى ما لا مركزى ، فكل المدارس حالياًتتيح لها أن تتخذ قرارها بشأن هذا التطوير، و إن المدرسين ومن يعملون في المدارس كانوا يطالبون بما هو أكثر مما كان عليه من قبل في اتخاذ القرار من قبل أهل المدارس. و ظهرت هذه المطالبة بسبب أن الطراز من تطوير المناهج كان قد ضحك من الأعلى إلى الأدنى بمعنى أن معظم القرارات بشأن المناهج كان بيد الحكومة المركزية و لم تكن المدارس تتخذ أى قرار إلا في حدود ضيقة جدا و خاصة بشأن هذا التطوير.

**Kata Kunci:** pengembangan kurikulum, Kurikulum Berbasis Madrasah, desentralisasi pendidikan, otonomi sekolah

## PENDAHULUAN

Madrasah, sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam, banyak menarik perhatian berbagai kalangan terutama para pemerhati pendidikan. Ketertarikan para pemerhati pendidikan ini disebabkan oleh banyak hal di antaranya ialah:(1) posisi madrasah sangat strategis dan vital di dalam membina generasi bangsa yang jumlah peserta didiknya sangat signifikan;(2) secara kuantitas, madrasah di Indonesia, baik negeri maupun swasta mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan menyebar di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan (3) adanya anggapan bahwa madrasah seakan-akan tersisih dan termarginalkan dari *mainstream* pendidikan nasional dan dianggap sebagai pendatang baru yang dianggap banyak mengalami masalah dalam hal mutu, menejemendan kurikulum.

Di sisi lain, perubahan besar yang terjadi di sekitar pendidikan Islam, yang mau tidak mau, madrasah harus menghadapinya dan mengharuskan terjadinya perubahan agar pendidikan Islam termasuk madrasah menjadi salah satu alternatif atau bahkan menjadi pilihan utama oleh masyarakat Indonesia. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari dan untuk masyarakat harus secepat mungkin melakukan pembenahan diri dalam menjawab tuntutan masyarakat dan dunia.

Untuk merespons tuntutan masyarakat dan menjaga jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan memiliki ciri khas Islam, menurut Fajar (2004:8), madrasah harus mengembangkan program seperti: memberikan nuansa Islam atau spritualisasi bidang studi umum, pengajaran bidang studi agama Islam yang bernuansa IPTEK, dan menciptakan suasana keagamaan di madrasah terutama dalam pembelajaran *mafikibi* (matematika, fisika, kimia, dan biologi) yang agamis dalam perilaku siswa. Lebih jauh, Fajar mengatakan bahwa madrasah dapat menjadi pendidikan alternatif jika memenuhi empat tuntutan, yaitu: kejelasan cita-cita dengan langkah yang operasional dalam usaha mewujudkan cita-cita pendidikan Islam, memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya, meningkatkan dan memperbaiki menejemen dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara itu, menurut Rahim dalam Suwito (2005:220), ada empat agenda besar yang perlu dilakukan madrasah agar segera menjadi madrasah unggulan dan

dambaan masyarakat, yaitu ketersediaan tenaga pengajar yang profesional, kelengkapan sarana dan prasarana, adanya penanganan dengan sistem manajemen profesional (modern, transparan, dan demokratis) dan adanya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu hal yang perlu digarisbawahi tentang pandangan Rahim di atas adalah *madrasah harus memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika ingin menjadi madrasah unggulan dan dambaan masyarakat*. Pandangan ini perlu penjabaran lebih jauh dan operasionalisasi agar kurikulum yang diinginkan betul-betul merupakan hasil seleksi kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan ini, pengembangan kurikulum madrasah seharusnya dilakukan dengan berbasis kebutuhan madrasah dan masyarakat di sekitarnya atau Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah (Brady, 1974:3-17; Print, 1993:19-23).

Dalam tulisan ini akan dikemukakan bagaimana konsep dan prosedur Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah, keuntungan dan kekurangannya, kendala pelaksanaannya, dan alternatif pengembangan ciri khas madrasah unggulan.

### **KONSEP PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MADRASAH**

Kecenderungan perubahan pembuatan keputusan kependidikan, yang dari semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, menjadi kewenangan atau otonomi sekolah telah terjadi di Australia sekitar lebih dari dua dekade terakhir ini. Sementara di Indonesia, desentralisasi pendidikan atau otonomi daerah memberikan suasana baru dalam pengelolaan dan pengembangan kurikulum madrasah, terlebih lagi setelah diberlakukannya Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP). Perubahan tersebut meliputi perpindahan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atas pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat menjadi kewenangan yang ada pada masing-masing sekolah/madrasah. Para guru dan seluruh komponen sekolah/madrasah menuntut lebih banyak kebebasan dalam menentukan kurikulum di sekolah/madrasah. Adanya tuntutan tersebut karena model pengembangan kurikulum selama ini adalah *centre based or top down*, yaitu kebijakan pengembangan kurikulum yang sepenuhnya ditentukan oleh

Pemerintah Pusat, hanya sedikit sekali otonomi bagi setiap sekolah dalam proses pengembangan kurikulum

Aspek perpindahan tanggung jawab di dalam pengembangan kurikulum memberikan otonomi yang luas kepada sekolah/madrasah dan guru di dalam mengambil suatu keputusan atas kurikulum apa yang perlu dikembangkan, khususnya pada tataran sekolah/madrasah. Keleluasaan madrasah dan guru di dalam mengambil keputusan berkaitan dengan pengembangan kurikulum sekolah/madrasah ini dikenal dengan Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah(SBCD). Karakteristik SBCD menurut Kemp (1977) adalah berupa suatu kontinum pengembangan kurikulum berbasis-sentral/pusat dengan model *top-down* hingga pengembangan kurikulum berbasis sekolah atau madrasah yang ditentukan oleh seluruh individu madrasah tersebut.

Dalam kenyataannya, sulit menentukan apa yang khas atau unik pada SBCD dalam prakteknya sebab meliputi suatu kontinum kegiatan yang berentang mulai dari seleksi individu hingga penentuan seluruh staf sekolah. Banyak yang menganggap bahwa praktek SBCD semacam itu merupakan praktek yang mengada-ada (kosmetik), atau sebaliknya dengan memandangnya sebagai prestasi dari praktek SBCD. Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah merupakan pengembangan suatu kurikulum atau salah satu aspek dari kurikulum oleh satu orang guru atau lebih di suatu sekolah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh sekolah, yaitu suatu solusi untuk memecahkan permasalahan yang dialami dengan kurikulum yang ada (Brady, 1990:3-17).

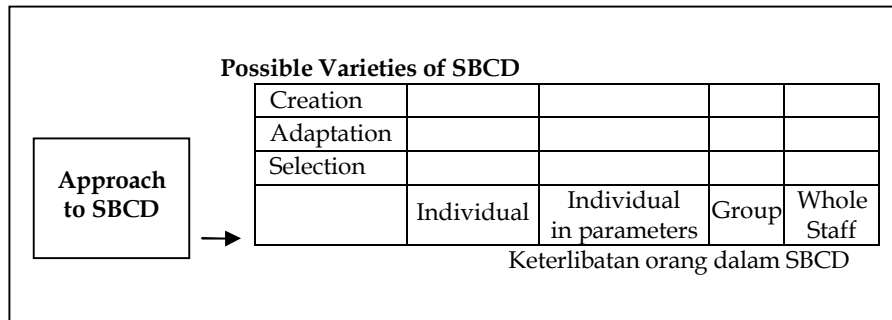
### **Pengertian Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah**

Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah dapat didefinisikan sebagai upaya pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan *bottom up* atau *school-based curriculum* yang memberi peluang secara utuh kepada sekolah/madrasah untuk melakukan pengembangan kurikulum. Pendekatan tersebut merupakan lawan dari pendekatan *centre based or top down* yang sedikit sekali melibatkan sekolah/madrasah dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum. Pendapat lain menyebut Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah sebagai suatu proses yang dilakukan oleh beberapa atau keseluruhan anggota masyarakat

sekolah/madrasah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian terhadap satu atau beberapa aspek kurikulum. Hal tersebut dilakukan dengan selektif, adaptif, dan kreatif.

Berikut ini dikemukakan bagan variasi Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah.

**Bagan 1**  
**Variasi Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah**



Sumber: Brady (1990:8)

Berdasarkan bagan di atas, dapat dipahami bahwa Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah melibatkan beberapa hal yaitu: (1) partisipasi guru dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum madrasah; (2) partisipasi seluruh komponen sekolah/madrasah yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, masyarakat, siswa, dan lain-lain; (3) pengembangan kurikulum bersifat selektif, adaptif, dan kreatif. Ketiga sifat inilah yang membedakan konsep pengembangan kurikulum sebelumnya. Meskipun beberapa penulis menganggap bahwa kegiatan seleksi, adaptasi, dan kreasi yang dilakukan oleh guru tidak termasuk dalam kategori pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah seperti yang terlihat pada bagan di atas; (4) adanya pergeseran tanggungjawab dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum dengan tidak memutuskan garis hubungan sekolah dengan Pusat; (5) bersifat dinamis yang secara ideal melibatkan guru, tenaga kependidikan lainnya, masyarakat, orang tua, dan siswa; (6) melibatkan kebutuhan dukungan struktur yang bervariasi; dan (7) adanya sebuah perubahan peran guru yang bersifat tradisional yang hanya bertugas sebagai pengajar menjadi peneliti dan pengembang kurikulum.

Pada dasarnya pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/ Madrasah bukan fenomena baru karena sebetulnya sudah dilakukan di beberapa sekolah, dan sangat sulit membuat batasan secara jelas atas pemahaman dari pengembangan kurikulum berbasis madrasah karena pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/ Madrasah mencakup pemilihan individual oleh seluruh staf. Oleh sebab itu, dalam pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah, pada tahap pertama perlu dilakukan analisis situasi sekolah dengan mempertimbangkan (1) struktur pendukung, yaitu ketentuan administratif di dalam pengimplementasiannya, baik di dalam maupun di luar sekolah; (2) struktur pengambilan keputusan, yaitu ketentuan administratif di dalam sekolah untuk mengoptimalkan partisipasi staf; (3) pergerakan akuntabilitas, yaitu dampak dari kurikulum untuk semakin meningkatkan akuntabilitas sekolah; (4) perubahan persepsi atas peran guru yaitu kemampuan para staf di dalam menyesuaikan peran barunya sebagai pengembang kurikulum daripada hanya sekedar pelaksana kurikulum; (5) sistem promosi, yaitu melalui tranfer dan promosi; dan (6) seorang ahli sekolah, yaitu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di dalam pengembangan kurikulum (Brady, 1946:11-13)

### **Personil yang Terlibat**

Secara historis ada empat macam person yang terlibat dalam pengambilan keputusan kurikulum termasuk dalam hal ini ialah pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah sebagai berikut:

*Pertama, specialized personnel* adalah (1) mereka yang berasal dari sekolah, seperti guru dan supervisor. Biasanya mereka adalah ahli dan terlatih dalam bidang kurikulum. Keahlian mereka adalah karena keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan; dan (2) ahli bidang studi atau mereka yang terlatih dalam penelitian organisasi kurikulum. Mereka memiliki basis perguruan tinggi dan bekerja serta berkonsentrasi dalam pengembangan disiplin ilmu tunggal yaitu konsultan.

*Kedua, representative groups composed of specialized personnel and class room teacher* adalah gabungan dari guru kelas dan group perwakilan dari para ahli.

*Ketiga, all professional personnel* adalah seluruh guru kelas, supervisor, guru khusus dan administrator. Mereka inilah yang

berpartisipasi dalam tiga system yaitu kurikulum, pembelajaran dan evaluasi. Asumsinya bahwa mereka yang mengambil keputusan rekayasa kurikulum adalah mereka juga yang mengembangkan, melaksanakan sekaligus mengevaluasi kurikulum.

*Keempat, all professional personnel plus representative lay citizens and student* adalah mereka yang tersebut pada nomor tiga ditambah dengan warga masyarakat yang peduli terhadap sekolah. Walaupun ada yang mempertanyakan keterlibatan masyarakat dalam rekayasa kurikulum dengan alasan bahwa rekayasa kurikulum itu bersifat teknis, para pendukung beranggapan perlunya *partnership* dalam dunia pendidikan sehingga tugas dari para masyarakat adalah melakukan pertimbangan nilai (Beauchanb, 1975:169-172).

### **Kelebihan dan Kekurangan Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah**

Beberapa keuntungan pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah yang dapat diidentifikasi adalah: (1) guru-guru lokal dapat menentukan penggunaan sumber daya sekolah dengan baik; (2) guru-guru yang mengimplementasikan kurikulum adalah mereka yang telah mengembangkan kurikulum tersebut. Ini memberikan suatu pemahaman yang lebih besar terhadap identifikasi tugas-tugas belajar; (3) kebutuhan siswa terpenuhi sehingga akan memiliki suatu pengaruh kuat pada siswa; (4) akuntabilitas yang besar terhadap kurikulum dan penampilan guru terlihat; (5) para orang tua dan anggota masyarakat dapat secara mudah terlihat dalam perencanaan kurikulum yang bermakna; dan (6) sebagai suatu kemampuan untuk melakukan rerspons terbaik terhadap kebutuhan situasi kelas, kesadaran terbaik di antara para staf dan terlihat adanya hubungan luas untuk memperbaiki kurikulum secara berkelanjutan

Adapun kelemahan pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah/Madrasah dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) kurangnya struktur pendukung untuk para administrator dan guru; (2) sindrom konformitas para administrator dan guru mengurangi kreativitas; (3) kurangnya waktu bagi guru untuk melaksanakan pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah; (4) kurangnya guru yang berpengalaman atau terlatih dalam proses pengembangan kurikulum berbasis sekolah/madrasah; (5) pergerakan guru antarsekolah untuk promosi layanan negara dan semacamnya menghasilkan suatu basis

guru yang tidak stabil; (6) perlunya perubahan-perubahan signifikan pada peran guru dan administrator yang secara alamiah menentang; (7) sekolah-sekolah satu sama lain dengan cepat menjadi berbeda/tidak memiliki langkah yang sama dan tumpang tindih bisa muncul di antara sekolah-sekolah tersebut; (8) para guru menganggap SBCD dari segi konsep merupakan model ideal karena ada latarbelakang pengumpulan informasi, perencanaan dan evaluasi, kerjasama dengan orang lain, namun terdapat kesulitan dan kontinuitas pelaksanaan; dan(9) persoalan dana, persepsi prioritas kompetensi dan masalah kemampuan para staf (Print, 1993:21-22).

### **PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MADRASAH**

Pada dasarnya prosedur pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah sama dengan prosedur pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah mengingat term madrasah dengan sekolah memiliki substansi yang sama, yaitu keduanya merupakan tempat belajar secara formal. Secara sederhana prosedur pengembangannya adalah sebagai berikut:

#### **Pemilihan Model Pengembangan**

Dalam Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah, para pengembang kurikulum dapat memulai dengan memilih model konsep pengembangan yang ditawarkan oleh para ahli kurikulum. Pemilihan model ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lokalitas atau kebutuhan masyarakat di mana madrasah itu berada. Beberapa model pengembangan berikut ini dapat dipilih oleh para pengembang kurikulum madrasah dengan mempertimbangkan hubungan antara elemen kurikulum dan urutan penyusunannya sebagai berikut:

#### ***Model Rasional atau Tujuan***

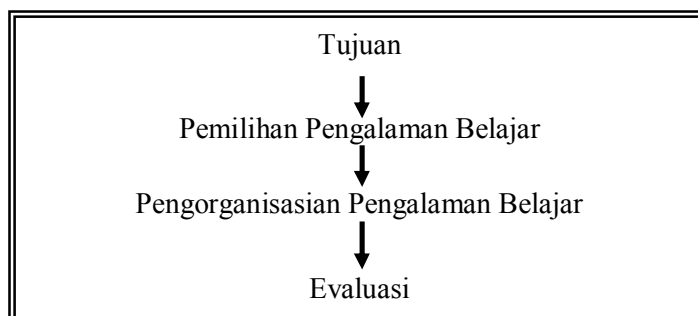
Model ini menekankan pada urutan elemen kurikulum yang dimulai dengan tujuan, kemudian materi, metode dan diakhiri dengan evaluasi. Tujuan merupakan elemen yang sangat penting karena menjadi dasar penyusunan elemen berikutnya. Ada dua macam model rasional, yaitu model Tyler dan model Taba.

*Pertama*, model Ralph Tyler. Menurut Tyler kurikulum harus disusun secara logis dan sistematis. Untuk menyusun kurikulum ada empat pertanyaan mendasar yang harus diajukan, yaitu:(1) apa tujuan



pendidikan yang ingin dicapai; (2) apa pengalaman pendidikan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan; (3) bagaimana mengorganisasikan pengalaman belajar secara efektif; dan (4) bagaimana menentukan apakah tujuan pendidikan telah tercapai? Model pengembangan Tyler dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

## **Bagan 2** **Model Ralph Tyler**



*Kedua*, model Hilda Taba. Model ini merupakan modifikasi dari model Tyler menjadi model pengembangan kurikulum yang sesuai di sekolah/madrasah. Agar kurikulum bermanfaat bagi siswa, menurut Taba, kebutuhan-kebutuhan siswa harus didiagnosis terlebih dahulu. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum bersifat induktif. Inilah yang membedakan model Tyler dan model Taba. Ada tujuh langkah pengembangan kurikulum menurut Taba, yaitu: (1) mendiagnosis kebutuhan; (2) merumuskan tujuan; (3) memilih isi; (4) mengorganisasi isi; (5) memilih pengalaman belajar; (6) mengorganisasi pengalaman belajar; dan (7) menentukan alat evaluasi.

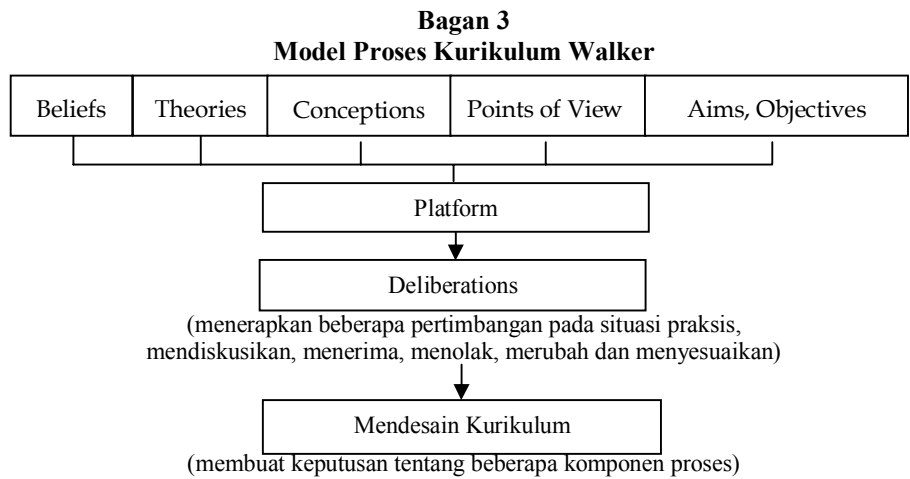
### **Model Siklus**

Model ini banyak sekali. Salah satu contoh model ini adalah model D.K. Wheeler. D.K. Wheeler mengembangkan dan memperluas gagasan kurikulum yang diajukan Tyler khususnya Taba. Ia mengemukakan, ketika kurikulum dikembangkan secara sistematis, kelima tahap yang saling terkait dalam pengembangan kurikulum akan menghasilkan kurikulum yang efektif. Ia menggabungkan elemen-elemen pokok yang digagas oleh Tyler dan Taba. Lima tahap yang dimaksud adalah (1) pemilihan tujuan (aims,

goals dan objectives); (2) pemilihan pengalaman belajar; (3) pemilihan isi; (4) pengorganisasian dan pengintegrasian pengalaman belajar dengan isi; dan (5) evaluasi masing-masing tahap dan pencapaian tujuan. Sumbangan penting Wheeler pada pengembangan kurikulum adalah penekanan pada konsep dasar proses kurikulum siklus dan elemen kurikulum yang saling terkait(Print:1993).

**Model Dinamik atau Interaktif**

Model dinamik ini berangkat dari pendekatan deskriptif terhadap kurikulum dimana para peneliti telah mengadakan observasi tingkah laku guru dan pengembang kurikulum karena pada dasarnya merekalah yang menyusun kurikulum. Hal ini akan menjadi landasan penting bagi penyusunan teori. Konsekwensinya adalah pendekatan perspektif-analitis tidak begitu menonjol dalam model ini. Di antara penulis yang mengembangkan model ini adalah Walker (1971) dan Skilbeck (1976). Berikut ini contoh model yang dikembangkan oleh Walker.Walker memulai dengan tiga tahapan dalam mempersiapkan penyusunan kurikulum. Ketiga tahap dimaksud dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber: Print (1993:75)

Bagan di atas menggambarkan tahapan pengembangan kurikulum dengan tiga tahap. Tahap pertama *statemen platform* diakui oleh para pengembang kurikulum. *Statemen* ini terdiri atas sejumlah

gagasan, pandangan, pilihan, kepercayaan, dan nilai. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi pembentukan dasar *platform*. Para pengembang kurikulum tidak boleh memulai tugasnya dengan tangan kosong. Semua hal diatas yang mereka bawa dalam proses pengembangan kurikulum dan berguna sebagai landasan atau *platform*. Kemudian, tahap kedua adalah tahap pertimbangan yang mendalam. Pada tahapan ini setiap pengembang kurikulum mempertahankan platformnya dan memusyawarakannya untuk mencapai kesepakatan. Tahap terakhir adalah mendesain kurikulum. Pada tahap ini, setelah mendiskusikan secara panjang lebar, mereka membuat keputusan beberapa komponen proses. Keputusan tersebut dicatat dan menjadi landasan dokumen kurikulum.

### ***Model Eklektik Murry Print***

Model pengembangan kurikulum eklektik ini dirancang untuk menawarkan pendekatan pengembangan kurikulum yang dapat dipahami secara mudah. Pendekatan ini diadopsi dari pendekatan sistematis-logis dan dinamik. Pendekatan sistematis-logis di sini karena dalam pengembangan kurikulum harus dilaksanakan dalam prosedur tahap demi tahap. Sedangkan pendekatan dinamik menggambarkan situasi yang sedang terjadi ketika pengembang dan guru menyusun kurikulum. Situasi ini ditandai dengan kebingungan dan tidak menentu yang akhirnya membutuhkan penjelasan yang tidak mudah. Dengan mengadopsi dua pendekatan diharapkan kurikulum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengembang kurikulum terutama para guru. Model ini dikembangkan di Australia setelah diadakan penelitian bahwa guru-guru tidak mengetahui banyak tentang kurikulum, model dan teori. Ada tiga tahap yang harus diikuti dalam model pengembangan kurikulum ini, yaitu: organisasi, pengembangan, dan aplikasi.

Untuk lebih jelasnya model ini dapat dilihat pada uraian berikut ini: (1) *organisasi*. Terdapat tiga pertanyaan mendasar yang harus diajukan pada tahap ini yaitu: (a) siapa yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, (b) konsep kurikulum apa yang mereka bawa, dan (c) kekuatan-kekuatan apa yang mempengaruhi cara berpikir mereka; (2) *pengembangan*. Pada tahap ini semua orang yang terlibat dalam penyusunan kurikulum berkumpul untuk menyusun

kurikulum yang dapat dilaksanakan. Untuk mencapai tahap ini pengembang mengikuti prosedur siklus yang dimulai dari analisis situasi, tujuan, isi, kegiatan belajar, dan evaluasi kemudian kembali ke analisis situasi lagi; dan(3) *aplikasi*. Pada tahap ini terdapat tiga kegiatan yang tergabung yaitu: (a) implementasi kurikulum, (b) monitoring dan umpan balik pada kurikulum, dan (c) penentuan data umpan balik pada kelompok *presage* (Print, 1993:84).

### **Analisis Situasi dan Kebutuhan**

Analisis situasi merupakan komponen tahap awal dari implementasi pengembangan kurikulum. Tahap ini merupakan tahap pertimbangan, dimana sipengembang kurikulum akan memutuskan kebijakan kurikulum atas dasar penelitian, pengetahuan dan pemahaman situasi dimana kurikulum itu dikembangkan. Salah satu factor yang harus dilakukan dalam pengembangan dan desain kurikulum adalah menganalisis situasi. Hilda Taba (1962) mempopulerkan *diagnosis of need* 'diagnosa kebutuhan'. Analisis situasi adalah pengujian detail dari konteks dimana kurikulum itu digunakan dan pengaplikasian analisisnya kepada kurikulum yang akan dikembangkan. Analisis ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pengembangan kurikulum dengan analisis situasi yang sistematis.

Analisis situasi dibutuhkan oleh pengembang kurikulum diberbagai tingkatan pendidikan, baik untuk satu sekolah, kelompok sekolah maupun wilayah atau sistem pendidikan sekolah, seperti yang dilakukan di *school-based curriculum development* (SBCD), tahap awal analisis dilakukan oleh guru terhadap lingkungan sekolahnya untuk mengembangkan kurikulum yang cocok dengan kebutuhan siswa. Agar kurikulum itu berguna, pertama-tama harus diketahui konteks dimana kurikulum itu dikembangkan.

Analisis situasi dapat didefinisikan sebagai proses pengujian konteks dimana kurikulum itu dikembangkan, serta pengaplikasian analisisnya pada kurikulum yang direncanakan. Ini adalah poin awal s untuk mengembangkan suatu kurikulum, sekaligus sebagai kesempatan bagi pengembang untuk mencatat faktor lokal dalam mengembangkan kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan siswa. Alasan melakukan analisis situasi ialah untuk: (1) mengidentifikasi kebutuhan lokal dari siswa, orang tua, guru, dan

masyarakat; (2) memahami konteks kurikulum lokal; (3) memfasilitasi perencanaan dan pengembangan berikutnya; dan (4) menyediakan *data base* sistematis untuk menemukan tujuan umum dan khusus kurikulum. Secara singkat ada tiga tahapan pelaksanaan analisis situasi, yaitu: *pertama*, analisis kebutuhan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan pimpinan di masa yang akan datang tentang kurikulum dengan menentukan ketidaksesuaian antara situasi berlangsung dan yang diinginkan. Analisis kebutuhan juga dapat digunakan oleh pengembang kurikulum untuk menentukan dan memprioritaskan kebutuhan pendidikan. Secara ekstrim, ini berguna dalam memfasilitasi analisis situasi dan meletakkan dasar untuk seperangkat tujuan kurikulum; *kedua*, melakukan pengujian sebuah kebutuhan dengan lima fase pendekatan. Kelima fase tersebut adalah: (1) merumuskan pernyataan tujuan dengan melibatkan seluruh guru, masyarakat, orang tua dan mungkin siswa; (2) menilai pernyataan-pernyataan tujuan dengan menggunakan skala (misalnya 1 sampai 5) oleh para individu dan kemudian dirata-ratakan dengan kelompok; (3) mengurutkan pernyataan-pernyataan tujuan dan menentukan pernyataan-pernyataan tujuan; (4) memeriksa masing-masing pernyataan, baik secara subjektif (melalui penilaian guru) maupun secara objektif (tes, pengujian, dll.), dalam bentuk hal apa yang terjadi di dalam institusi tersebut, suatu kesenjangan dapat ditentukan dengan menggambarkan perbedaan antara realitas dan keadaan yang dipilih siswa; dan (5) mengembangkan rencana-rencana tindak dengan menggunakan ketidaksesuaian sebagai suatu basis untuk melakukan perubahan, para pengembang kurikulum kemudian mulai menciptakan atau menyesuaikan kurikulum yang akan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi; *ketiga*, pelaksanaan analisis situasi dengan melibatkan empat langkah, yaitu: (1) mengidentifikasi permasalahan dalam konteksnya; (2) memilih faktor-faktor yang tepat; (3) mengumpulkan dan menganalisis data; dan (4) membuat rekomendasi.

Terdapat dua jenis faktor analisis situasi, yaitu: (1) faktor eksternal sekolah yang meliputi perubahan dan harapan kultural dan sosial, prasyarat dan tantangan sistem pendidikan, perubahan hakekat

muatan, sistem dukungan guru, sumber daya; dan (2) faktor internal sekolah yang terdiri atas siswa, guru, etos sekolah, sumber daya materi, dan permasalahan yang dihadapi. Setelah melaksanakan pengumpulan dan analisis data dalam suatu analisis situasi, para pengembang kurikulum membuat rekomendasi untuk arah dan struktur kurikulum yang diajukan (Print, 1993:109-111).

### **Penentuan *Aims*, *Goals*, dan *Objectives***

Berikut penjelasan tentang *aims*, *goals*, dan *objectives* secara sederhana: Istilah *aims* digunakan sebagai tujuan pendidikan yang merupakan harapan dan keinginan dari suatu masyarakat, atau apa yang diharapkan atau ingin dicapai oleh kurikulum secara luas. Atau dengan kata lain, *aims* merupakan tujuan suatu pendidikan secara umum dan menunjukkan jangka waktu yang relatif panjang dan berlaku untuk beberapa tahun. Sementara, istilah *goals* digunakan untuk tujuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan *aims*. Secara jelasnya *goals* merupakan tujuan kurikulum yang dijabarkan dari *aims*. Biasanya diungkapkan dalam bahasa yang tidak bersifat teknis, juga diarahkan pada pencapaian prestasi siswa dengan meningkatkan isi dan *skill*. Cara lain untuk mengkonseptualisasikan *goals* adalah dengan mempertimbangkannya sebagai cara dari suatu institusi dan organisasi beserta masyarakat dalam membantu pencapaian tujuan pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika umpamanya tujuan (*aims*) sistem pendidikan itu adalah membuat siswa bisa membaca dan berhitung, tujuannya (*goals*) adalah cara suatu institusi pendidikan secara umum dalam mencapai tujuan (*aims*) tersebut. *Goals* merupakan tujuan yang bersifat jangka menengah. Selanjutnya, *objectives* merupakan rumusan tujuan kurikulum yang paling spesifik, yaitu apa yang seharusnya siswa pelajari melalui interaksi dengan kurikulum. *Objectives* menekankan pada perubahan tingkah laku siswa. *Objectives* merupakan penjabaran dari *aims* dan *goals*, dan dinyatakan secara jelas, menggunakan bahasa teknis dan istilah-istilah perilaku.

Bagan 4  
Hubungan antara *Aims*, *Goals*, dan *Objectives*

KRITERIA	AIMS	GOALS	OBJECTIVES
<b>DEFINISI</b>	Secara umum dinyatakan tentang apa yang harus dicapai oleh suatu kurikulum	Tujuan kurikulum yang dinyatakan secara lebih jelas dan merupakan penjabaran dari <i>aims</i>	Pernyataan yang lebih spesifik tentang tujuan suatu program dan merupakan penjabaran dari <i>goals</i> .
<b>EKSPRESI</b>	Dinyatakan secara luas, menggunakan bahasa yang tidak bersifat teknis	Secara umum dinyatakan dengan bahasa yang tidak bersifat teknis.	Bahasa yang bersifat teknis, kata kunci yang tegas, dapat menggunakan istilah perilaku
<b>WAKTU</b>	Tujuan jangka panjang, biasanya untuk beberapa tahun	Tergantung pada bagaimana tujuan jangka ( <i>aims</i> ) tersebut dijabarkan ke dalam <i>goals</i> .	Jangka pendek, mencakup tujuan suatu pengajaran, satu hari, satu minggu, satu semester.
<b>DINYATAKAN OLEH</b>	Masyarakat melalui bentuk-bentuk seperti politisi, sistem pendidikan, kelompok penekan.	Otoritas pendidikan dalam suatu sistem, level daerah, perumus silabus, dokumen kebijakan sekolah.	Guru kelas secara individual, kelompok guru

Sumber: Print (1993:118)

Sementara ciri-ciri tujuan (*objectives*) yang efektif adalah: (1) *comprehensiveness*, yaitu tujuan kurikulum harus dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai masukan antara lain dari berbagai kalangan profesi, dan harus mempertimbangkan perkembangan zaman serta perkembangan politik ekonomi yang terjadi. Komprehensif berarti tujuan kurikulum dirumuskan harus mencakup ketiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor; (2) *consistency*, yaitu tujuan kurikulum harus memperlihatkan hubungan efektif dan konsisten dengan unsur-unsur lain. Salah satu sumber kekacauan atau ketidakjelasan tujuan adalah jika tujuan khusus ini dirumuskan tanpa merujuk kepada tujuan umum (*aims*, *goals*); (3) *attainability*, yaitu tujuan kurikulum yang dirumuskan harus memungkinkan untuk dicapai oleh siswa; (4) *suitability*, yaitu "kesesuaian tujuan dengan kebutuhan siswa dan siapa yang berhak menentukan kesesuaian tersebut". Para pengembang kurikulum sepakat bahwa tujuan kurikulum harus disusun sesuai

dengan kebutuhan-kebutuhan siswa; (5) *validity*, yaitu tujuan harus merefleksikan realitas apa yang mereka maksud, atau tujuan harus menggambarkan apa yang ingin mereka capai; dan (6) *specificity*, yaitu tujuan pendidikan tersebut harus dirumuskan secara tepat, jelas, dan spesifik. Tujuan yang tidak jelas dan tidak spesifik akan sulit dipahami, baik oleh murid maupun oleh guru. Khususnya bagi guru, akan sulit mengimplementasikan dan merealisasikannya. Oleh karena itu, tujuan kurikulum harus disusun dalam bentuk rumusan perilaku yang jelas dan spesifik.

### **Merumuskan Isi Kurikulum**

Isi kurikulum adalah bahan ajar dalam proses belajar mengajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang terkait dengan bahan ajar yang disampaikan tersebut. Agar menjadi guru yang efektif, ia harus memiliki (1) pengetahuan yang berisi fakta, prinsip, dan generalisasi yang ada dalam bahan ajar; (2) pengetahuan pendidikan meliputi metode yang digunakan guru dalam mengajar agar siswanya benar-benar memahami materi ajar; dan (3) pengetahuan kurikulum, yaitu pemahaman terhadap konteks kurikulum dalam mengajarkan pengetahuan tentang materi ajar.

Selanjutnya, kriteria pemilihan isi kurikulum. Di sini dapat dikemukakan enam kriteria pemilihan isi kurikulum, yaitu: (1) signifikansi dengan pengetahuan dan disiplin ilmu, serta seimbang antara konsep, ide, dan fakta; (2) validitas, yaitu isi harus otentik, benar, dan akurat; (3) relevansi sosial dalam arti berhubungan dengan nilai moral, ideal, masalah sosial, dan isu-isu kontroversial; (4) utilitas, menyiapkan siswa agar hidup lebih "dewasa"; (5) *learnability*, yaitu dapat digunakan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda; (6) *interest*, yaitu didasarkan pada minat anak didik. Sementara ruang lingkup isi kurikulum mengacu pada keluasan dan kedalaman kurikulum pada satu kurun waktu. Dalam menentukan ruang lingkup isi kurikulum, ada beberapa konsep yang perlu dipertimbangkan yaitu: *time constraint* 'hambatan waktu', *a common core* 'konsep inti', *special needs of content* 'kebutuhan khusus dari isi', *integration of content* 'keterpaduan isi', dan *a total amount of content required* 'jumlah isi yang dibutuhkan'.



Penyusunan materi juga harus mempertimbangkan keruntutan (*sequence*). Keruntutan adalah susunan dari isi kurikulum yang disampaikan pada peserta didik. Ada enam kriteria dalam mengurutkan isi kurikulum, yaitu: *simple to complex* 'dari yang sederhana menuju yang kompleks', *prerequisite learnings* 'pelajaran bersyarat', *chronology* 'kronologis', *whole-to-part learning* 'dari keseluruhan ke bagian-bagian', *increasing abstraction* 'dari konkret ke yang abstrak', dan *spiral sequencing* 'pengurutan secara spiral'.

### **Seleksi Metode-metode Kurikulum**

Pemilihan metode mungkin membutuhkan perlakuan yang lebih dibandingkan dengan komponen kurikulum lainnya. Dampak dari metode sangatlah penting, dan pada bagian ini akan dipaparkan pentingnya pemilihan metode sebagai bagian utama dari komponen kurikulum. Metode adalah bagaimana seorang guru mengaktifkan isi kurikulum, karena isi kurikulum akan berarti bagi siswa apabila guru dapat mentransmisikannya dengan berbagai cara. Tidak ada satupun metode yang paling baik, seperti halnya bahwa semua komponen kurikulum pada dasarnya adalah sama pentingnya.

Untuk meningkatkan efisiensi belajar siswa, guru harus dapat memilih metode yang paling pas dari sekian metode yang ada. Beberapa kriteria dalam memilih metode dan terlepas dari rumusan *objectives* adalah: (1) prinsip-prinsip belajar dan (2) identifikasi kegiatan belajar yang dilakukan. Selain kedua kriteria tersebut di atas, masih terdapat kriteria lainnya, yaitu: (1) *variety*, yaitu metode harus bervariasi untuk mencapai tujuan dan dapat mengakomodasikan perbedaan tingkat dan gaya belajar siswa; (2) *scope*, yaitu metode harus cukup bervariasi di dalam mencapai seluruh tujuan yang sudah dirumuskan; (3) *validity*, yaitu metode khusus harus berhubungan dengan bagian-bagian rumusan tujuan; (4) *appropriateness*, yaitu metode harus berhubungan dengan minat, kemampuan, dan keterbacaan siswa; (5) *relevance*, yaitu metode yang digunakan harus berhubungan dengan apa yang dibutuhkan setelah siswa tamat belajar.

Penelitian berkaitan dengan metode menunjukkan dan memberikan saran bahwa sebaiknya keterlibatan siswa di dalam perencanaan kurikulum harus semakin ditingkatkan. Oleh karena itu, keterlibatan siswa di dalam pemilihan metode kedepan harus semakin dipertimbangkan di dalam upaya pemilihan isi kurikulum

dan pencapaian tujuan. Terminologi metode pada prinsipnya juga mencakup (1) *integration*: paduan mata pelajaran ke dalam wilayah yang lebih besar sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antar setiap mata pelajaran; (2) *sequence*: urutan mata pelajaran dan pengalaman belajar kedalam tahapan belajar yang dapat dikelola untuk pengembangan konsep; dan (3) *arrangement*: organisasi mata pelajaran yang membuat logis dan semakin mudah dipelajari (Brady, 1946:111-126).

Pada dasarnya tidak ada suatu metode tunggal yang lebih baik atau lebih buruk jika dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Setiap metode memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan sendiri. Seleksi metode penting untuk meningkatkan efisiensi belajar siswa. Adapun kriteria penyeleksiannya antara lain dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan identifikasi kegiatan belajar, prinsip variasi, ruang lingkup, validitas, relevansi, dan kesesuaian metode.

### **Evaluasi Kurikulum**

Meskipun evaluasi kurikulum adalah bagian dari totalitas sistem penilaian madrasah, pelaksanaan evaluasi kurikulum secara fungsional seharusnya menjadi bagian dari sistem kurikulum dan subjek untuk rekayasa kurikulum. Ada empat dimensi dari evaluasi kurikulum, sebagai berikut:

*Pertama, evaluasi guru dalam menggunakan kurikulum.* Evaluasi guru dalam penggunaan kurikulum secara logis adalah hal pertama untuk dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan cara pengamatan data-data penggunaan guru terhadap kurikulum. Ketika guru tidak menggunakan kurikulum dalam pengembangan strategi pembelajarannya, maka evaluasi pun dihentikan.

*Kedua, evaluasi desain kurikulum.* Evaluasi desain merupakan evaluasi yang paling sulit dilakukan karena ketiadaan kriteria dalam pelaksanaannya. Desain yang berbeda tentu tidak dapat dibandingkan dan disesuaikan dengan kriteria yang umum. Untuk memastikan kesuksesan seorang guru dalam menggunakan kurikulum, maka kecukupan desain perlu diperhatikan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melihat aspek-aspek umum dari sebuah desain. Akan tetapi, hal inipun belum terformulasi. Meskipun kita tidak belajar banyak tentang bagaimana membandingkan desain kurikulum A

dengan desain kurikulum B dengan sebuah pengawasan yang cukup, tetapi kita dapat mengevaluasi individual yang merupakan bagian dari desain kurikulum. Salah satu contohnya adalah *goals* dan *objectives*. Jika sejumlah tujuan umum dan khusus dinyatakan dalam sebuah kurikulum, tujuan-tujuan prioritas yang lebih dahulu dievaluasi. Teknik Delphi atau beberapa teknik lainnya dapat membantu tugas ini. Jika kurikulum mencakup tujuan tingkah laku yang khusus, kejelasannya merupakan hal penting untuk dievaluasi.

*Ketiga, evaluasi lulusan.* Evaluasi berikutnya adalah penilaian kurikulum sebagai instrumen untuk memprediksi lulusan. Hal ini juga sangat sulit untuk dilakukan karena dalam beberapa variabel sistem pembelajaran awal sekolah telah terjadi percampuran antara waktu perencanaan kurikulum dengan ketepatan pembelajaran siswa. Pada tingkat penilaian pembelajaran siswa, kita dapat membedakan antara pembelajaran yang diinginkan dengan pembelajaran yang diperoleh di luar bidang kurikulum dan pembelajaran. Jika kurikulum adalah rencana dasar dengan tujuan yang diinginkan dan isi budaya yang diseleksi yang diharapkan untuk menghasilkan tujuan tersebut, dan jika perencanaan pembelajaran telah diperluas ke dalam tujuan yang lebih khusus, maka tujuan itu yang menjadi dasar penilaian usaha sengaja dari sekolah.

*Keempat, evaluasi sistem kurikulum.* Setiap aspek kurikulum harus di bawah pengawasan evaluasi. Umpan balik dari sistem evaluasi itu seharusnya tersedia untuk memudahkan perbaikan sistem. Pemilihan arena, pemilihan orang yang terlibat, pengorganisasian orang-orang untuk bekerja, prosedur kerja, tugas-tugas yang diperankan oleh kepemimpinan personal adalah keseluruhan subjek yang harus dievaluasi baik kelebihan maupun kekurangannya. Hal inilah yang membuat sistem kurikulum bekerja. Umpan balik dari evaluasi itu dapat membantu untuk memperbaiki sistem dan menyediakan keberlanjutan dan perkembangan sistem kurikulum dari tahun ke tahun (Beauchamb, 1975:169-172).

Adapun kriteria pelaksanaan evaluasi kurikulum yang baik adalah: (1) *continuity*, yaitu evaluasi harus dilakukan berkesinambungan dan merupakan bagian terpadu di setiap bagian pembelajaran dan pengajaran; (2) *scope*, yaitu prosedur evaluasi harus bervariasi sebagai cakupan dari tujuan; (3) *compatibility*, yaitu evaluasi harus kompatibel dengan rumusan tujuan; (4) *validity*, yaitu prosedur

evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Test juga harus reliabel; (5) *objectivity*, yaitu evaluasi harus didasarkan pada objektivitas dan hindari yang mengarah pada subjektivitas; (6) *diagnostic value*, yaitu evaluasi harus mengenal tingkatan performa siswa dan proses yang diperlukan untuk mencapai performa tersebut; dan (7) *participation*, yaitu prosedur evaluasi memungkinkan untuk ditingkatkan oleh para siswa itu sendiri (Brady, 1946:132-136).

Adapun model evaluasi yang digunakan, para pengembang kurikulum dapat memilih berbagai model evaluasi yang ditawarkan secara konsep oleh para ahli evaluasi kurikulum.

### **Implementasi Kurikulum**

Implementasi berarti menempatkan kurikulum untuk direalisasikan. Ada dua pertimbangan untuk sebuah kurikulum yaitu sebagai bagian dari pengajaran dan kurikulum sebagai sebuah sistem untuk memprediksi hasil pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, implementasi kurikulum terdiri dari berbagai proses untuk menyelesaikan dua tujuan tersebut. Tugas pertama dari implementasi kurikulum adalah mengatur lingkungan sekolah sehingga kurikulum dapat digunakan oleh guru sebagai bagian penting dari pengajarannya. Implementasi berada pada wilayah gabungan sistem kurikulum dengan sistem pembelajaran. Dalam hal ini kurikulum menjadi alat kerja bagi guru. Peran perencana kurikulum itu dikomunikasikan dan ditafsirkan oleh guru untuk sekelompok siswa. Syarat utama dalam implementasi kurikulum adalah komitmen para guru untuk menggunakan kurikulum sebagai bagian dari pengembangan strategi pembelajaran. Untuk meningkatkan komitmen guru tersebut maka perlu ada panduan dan melibatkan mereka dalam perencanaan serta administrasi kepemimpinan

### **Umpan Balik dari Perubahan Kurikulum**

Dalam pelaksanaan sebuah kurikulum, tentu saja tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya umpan balik atau perubahan-perubahan dalam proses pelaksanaannya. Perubahan kurikulum tetap mencerminkan perubahan di dalam masyarakat dan pendidikan secara umum. Oleh karena itu, kebanyakan yang berhubungan dengan perubahan kurikulum di dalam sekolah tersebut menunjuk pada cara menerapkan perubahan

terefektif. Suatu inovasi kurikulum akan mengubah masyarakat ke arah tertentu, tetapi pada dasarnya perubahan kurikulum mencerminkan perubahan masyarakat.

Dalam perubahan kurikulum terdapat beberapa konsep antara lain: (1) *inovasi*, yaitu suatu obyek, gagasan atau praktek yang bersifat baru dan dengan proses yang baru dan memungkinkan untuk diadopsi; (2) *difusi*, yaitu suatu proses yang terkait dengan penyebaran suatu gagasan yang baru dari orang yang mengadopsinya; (3) *disiminasi*, yaitu suatu proses yang sengaja untuk menyebar suatu ide yang baru yang berasal dari orang yang mengadopsi; (4) *change agents*, yaitu individu dan kelompok yang terlibat dalam proses perubahan melalui jalur komunikasi antara *inovator* dan klien; (5) *adopsi*, yaitu mengacu pada penerimaan awal dari suatu inovasi dan tingkat penerimaannya dalam suatu sistem.

Ada empat prinsip pokok yang menjadi sumber perubahan kurikulum, yaitu: (1) kurikulum sekolah berubah sebagai cerminan perubahan di dalam masyarakat; (2) kurikulum sekolah tersebut bereaksi terhadap perubahan di dalam masyarakat secara cepat dan sengaja; (3) perubahan terjadi karena adanya benturan secara implisit antara praktek dengan kebijakan kurikulum; dan (4) perubahan mungkin dibuat atau dicari di dalam kebijakan dan praktek kurikulum untuk mempromosikan tujuan tertentu atau mencapai sasaran tertentu di dalam sistem. Adapun proses perubahan kurikulum sekolah pada umumnya dengan beberapa pertimbangan, antara lain adanya perubahan kurikulum akibat dari inisiatif sekolah karena kebutuhan para siswa yang berbeda.

Berdasarkan riset para ahli kurikulum, terdapat empat tahap dasar proses perubahan kurikulum, yaitu: (1) kebutuhandiawal proses perubahan kurikulum karena adanya perhatian, ketidakpuasan atau kebutuhan dengan kurikulum yang telah berjalan. Kebutuhan dapat bersumber dari para guru, para siswa, orang tua, pengurus-pengurus, sistem bidang pendidikan atau didasarkan pada gabungan beberapa sumber pertimbangan diatas; (2) *adopsi*, berarti penerimaan yang sengaja terhadap suatu inovasi, sebagai bentuk pernyataan dalam memutuskan akan satu kebutuhan. Faktor-faktor penting di dalam keberhasilan suatu *adopsi* antara lain ialah: (1) adanya akses dengan pengambil kebijakan/keputusan; adanya beberapa bentuk alternatif dari inovasi; (2) adanya dukungan administratif dari Pusat untuk

inovasi yang merupakan kebutuhan bersama dan memiliki kualitas yang baik, ketersediaan pembiayaan dalam mendukung implementasi, peran dan efektivitas penuh dari agen-agen perubahan masyarakat yang stabil; (3) implementasi yang merupakan suatu rangkaian dari adopsi terhadap suatu inovasi sampai kepada proses penerimaan atau pelembagaan yang lengkap; dan (4) pelembagaan/berkesinambungan yaitu suatu inovasi harus dilaksanakan secara terus-menerus dari waktu ke waktu dalam proses berintegrasi dalam satu struktur organisasi. Disadari bahwa tahap ini memerlukan banyak waktu dan perubahan. Tidak dapat dijamin bahwa inovasi sukses sampai pada pelembagaan. (Print, 1993:221).

### **KETERLIBATAN ORANG TUA DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Dalam rangka menjadi lembaga pendidikan Islam unggulan, maka madrasah dalam melakukan seluruh kegiatannya tetap memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. “Madrasah yang lahir dari dan untuk masyarakat harus tetap mempersiapkan kebutuhan yang nyata dari masyarakat sebagai pemilik lembaga pendidikan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan masyarakat lokal, nasional, regional, dan global. Keterbatasan partisipasi masyarakat akan berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Bentuk-bentuk kepercayaan yang dimaksud dapat berupa partisipasi masyarakat dalam memobilisasi sumber-sumber dana yang tersedia pada orang tua dan masyarakat, sementara dukungan Pemerintah terhadap lembaga pendidikan berkurang, apalagi madrasah yang pengelolaannya berada di bawah Departemen Agama, bukan di bawah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Salah satu bentuk keterlibatan orang tua atau masyarakat adalah keterlibatan mereka dalam pengembangan kurikulum. Menurut Ramsay dkk.(1993), terdapat enam tahapan sistematis yang dapat dilakukan oleh pengembang kurikulum dalam upaya melibatkan orang tua atau masyarakat dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah: *pertama*, pra pengembangan atau persiapan kerja. Dalam tahapan awal ini, pengembang kurikulum mengidentifikasi tingkat keterlibatan orang tua dalam sekolah. Dalam pelaksanaannya, para guru sesungguhnya dapat bertindak sebagai

peneliti dalam rangka pengembangan kurikulum; *kedua*, mulai bekerja. Pengembang kurikulum melakukan pertemuan dengan pihak sekolah (kepala sekolah, para staf, para orang tua). Dari pertemuan ini, pengembang kurikulum memperoleh ide atau informasi yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan pengembangan kurikulum selanjutnya; *ketiga*, membangun lingkaran kerja. Pada tahapan ini, pihak sekolah membentuk sebuah struktur atau mengangkat pengurus Komite Review Kurikulum (*Curriculum Review Commite*). Komite ini bertujuan sebagai pengendali atau pengarah atau kepemimpinan group. Sekalipun melibatkan orang tua dan masyarakat dalam tahapan ini, para guru tetap menjadi kunci utama yang harus menjaga atau menjamin pelaksanaan kurikulum di kelas serta menjadi kunci dalam teknik berinteraksi dengan para orang tua. Berkaitan dengan ini, diharapkan setiap sekolah memiliki rincian pribadi siswa, latar belakang keluarga, pengalaman pendidikan dan karakteristik pembelajaran dan perilaku siswa. Untuk mengetahui hal ini, beberapa sekolah mengirimkan angket untuk orang tua atau dengan mewawancarai siswa sendiri; *keempat*, melakukan pertemuan rutin dengan para orang tua/masyarakat. Minimal ada tiga kategori pendekatan yang dapat dilakukan untuk melibatkan orang tua, yaitu: (1) aktivitas sosial yang membuka kesempatan bagi orang tua untuk berpartisipasi dalam aktivitas pendidikan, seperti: jamuan makan malam multikultural, hari olah raga sekolah, dan lain-lain; (2) kegiatan yang terpusat pada anak dengan menfokuskan diri pada penggambaran perhatian orang tua atau keterlibatan mereka dalam beberapa pembelajaran khusus bagi anak atau pertimbangan perilaku; dan (3) kegiatan yang terpusat pada isu tertentu; *kelima*, melakukan pertimbangan, pengelompokan dan perencanaan ulang dalam bentuk evaluasi bersama; dan *keenam*, mengembankan piagam kerja sama (Bolstad, 2004).

Koentjaraningrat (1982) membagi dua partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum, yaitu partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk pada frekuensi keikutsertaan orang tua dan masyarakat terhadap pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Sementara partisipasi kualitatif menunjuk pada tingkat dan derajatnya. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi patner orang tua dan masyarakat.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh madrasah untuk menggalang partisipasi orang tua dan masyarakat adalah: (1) melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, pentas seni dan lain-lain; (2) mengidentifikasi tokoh masyarakat (orang tua, tokoh agama, olahragawan, seniman dan lain-lain) yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat; (3) melibatkan orang tua dan masyarakat dalam berbagai program, seperti melibatkan kepolisian dalam kegiatan baris berbaris; dan (4) memilih waktu yang tepat untuk melibatkan orang tua dan masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang

Sementara itu, Depdiknas (2000) menyebutkan beberapa hal yang perlu dilakukan sekolah untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum, yaitu melaksanakan program-program kemasyarakatan, mengadakan *open house* yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui program sekolah, mengadakan buletin sekolah dan membuat program kerja sama dengan masyarakat. Memperhatikan pandangan di atas, tampaknya keterlibatan orang tua dan masyarakat, hanya terfokus pada pelaksanaan kurikulum madrasah. Hal ini berarti orang tua dan masyarakat belum dilibatkan secara maksimal dalam mendesain dan mengembangkan kurikulum seperti yang diinginkan dalam konsep pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah.

#### **ALTERNATIF PENGEMBANGAN CIRI KHAS MADRASAH**

Madrasah sebagai lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat, seharusnya senantiasa berusaha keras untuk mengembangkan kurikulumnya dengan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, madrasah harus melibatkan seluruh potensi yang dimiliki dengan menerapkan konsep pengembangan kurikulum berbasis madrasah. Diharapkan dengan konsep ini, madrasah memiliki ciri khas sebagai lembaga pendidikan yang berbeda dengan lembaga pendidikan umum lainnya.

#### **Pengembangan Ciri Khas Madrasah Bidang Keagamaan**

Dalam pasal 55 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat



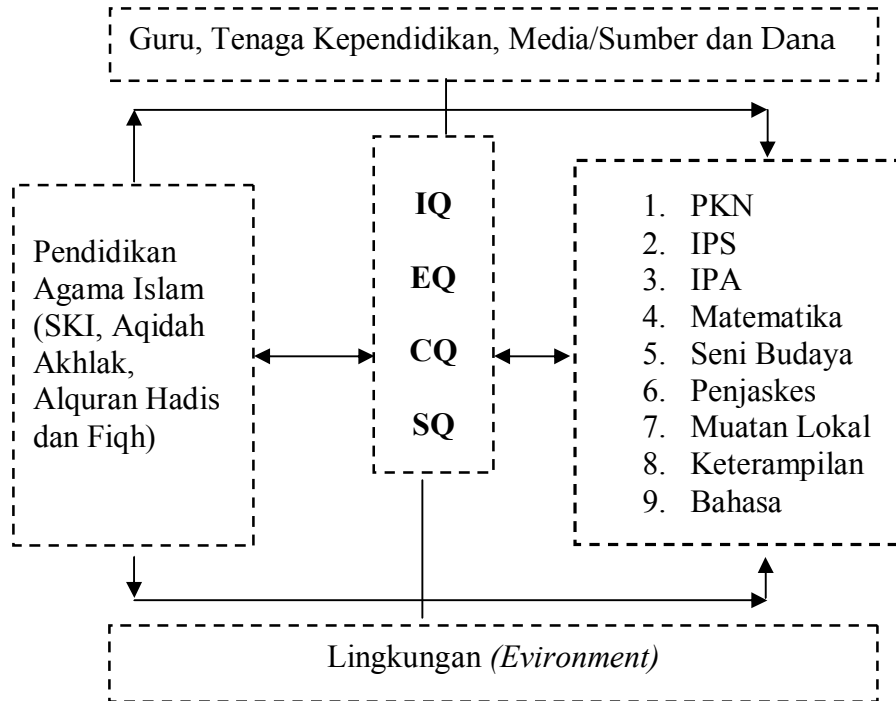
sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dalam hubungan ini, setiap satuan pendidikan termasuk madrasah mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pelaksanaan kurikulum, evaluasi pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, perguruan Islam, khususnya madrasah juga memiliki tujuan untuk menghasilkan pendidikan yang khas yaitu manusia muslim yang menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dengan menjadikan semua mata pelajaran sebagai wahana untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan agama. Mata pelajaran yang dimaksud adalah Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni dan Budaya, Penjaskes, Muatan Lokal, dan lain-lain. Semua mata pelajaran ini diberikan nuansa keagamaan atau pelaksanaannya dijiwai oleh pendidikan agama.

Menurut Muhaimin (2007), kurikulum madrasah perlu dikembangkan secara terpadu dengan menjadikan ajaran dan nilai Islam sebagai petunjuk dan sumber konsultasi bagi pengembangan berbagai mata pelajaran umum, yang operasionalnya dapat dikembangkan dengan cara mengimplisitkan ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalam bidang studi umum seperti: IPA, IPS, Matematika, dan bidang studi lainnya. Dengan demikian, kesan dikotomis menjadi hilang. Model pembelajaran yang cocok adalah team teaching yaitu guru bidang studi umum bekerja sama dengan guru bidang studi agama Islam seperti: Akidah Akhlak, Fikih, Alquran Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam untuk menyusun desain pembelajaran yang aplikatif dan detail untuk diimplementasikan dalam pembelajaran.

Secara sederhana, bagan di bawah ini memperlihatkan model kurikulum terpadu bagi madrasah dimana bidang studi rumpun agama Islam yang terdiri atas Akidah Akhlak, Fikih, Alquran Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam serta penciptaan suasana lingkungan yang religius harus menjadi komitmen bagi setiap warga madrasah dalam rangka mewujudkan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh dan praktek keislaman. Bidang studi rumpun agama Islam merupakan inti sehingga bahan-bahan yang termuat dalam bidang studi umum PKN, IPS, IPA, Matematika, Seni Budaya, Penjaskes, Muatan Lokal, Keterampilan, dan Bahasa harus dijiwai dengan pendidikan agama Islam. Bidang studi rumpun Agama Islam juga menjadi motivator dan dinamisator bagi pengembangan kualitas IQ (*Intelegent Quotient*),

EQ, (*Emotional Quotient*), CQ (*Creativity Quotient*) dan SQ (*Spiritual Quotient*)(Muhaimin, 2007:217).

**Bagan 5**  
**Alternatif Model Kurikulum Terpadu bagi Madrasah**



Sumber: Muhaimin (2007:216)

Pengembangan ciri khas madrasah bidang keagamaan juga ditandai dengan adanya berbagai kegiatan, seperti: meningkatnya program pendidikan agama secara optimal, penambahan jam pelajaran agama, semakin terhindarnya kegiatan pendidikan yang dikotomis antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, terwujudnya suasana keagamaan yang tercermin dalam kehidupan ibadah dan perilaku, meluasnya kegiatan ekstra kurikuler yang menitikberatkan pada pengembangan kepribadian secara utuh dan semakin terpeliharanya pelaksanaan ajaran agama Islam di sekolah seperti kekeluargaan, harga diri, semangat kebersamaan, dan lain-lain.

## PENUTUP

Jika dilihat dari semangat pemberian kekuasaan/wewenang pengembangan kurikulum ke satuan-satuan pendidikan (*devolution*), pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mirip dengan konsep *school-based curriculum development* (SBCD) di Australia yang mulai ditetapkan pertengahan tahun 1970-an, yang dalam tulisan ini menggunakan istilah “Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah”.

Konsep *school-based curriculum development* (SBCD) ini memiliki beberapa karakteristik yang secara umum mirip dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Di antaranya adanya partisipasi guru, partisipasi keseluruhan atau sebagian staf sekolah, variasi kegiatannya mencakup seleksi, adaptasi dan kreasi baru, adanya perpindahan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat meskipun bukan pemutusan tanggung jawab sama sekali, proses berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dan orang tua bahkan siswa, dan ketersediaan struktur pendukung untuk membantu guru dan madrasah. Apapun namanya, apakah pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah atau Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP), seharusnya pihak madrasah atau sekolah memanfaatkan kurikulum ini untuk mengembangkan madrasah dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk melahirkan generasi muda Islam yang bermutu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beauchamb,A. George.1975*Curriculum Theory*. Edisi ke-3. Illinois Wilmette.
- Brady, Laurie. 1947. *Curriculum Development*. Third Edition.Victoria, Australia: Prentice Hall.
- Bolstad,Rachel. 2004. <http://www.nzcer.org.nz/pdfs/1314bib.pdf>*School-Based Curriculum Development*,diakses 15 Desember 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Materi 10–Penyusunan KTSP.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000.*Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 010/0/2000 tentang Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Fajar, Malik.t.th. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*.
- Hamalik, Oemar.2008. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Edisike-2. Bandung:Rosdakarya.

- Muhaimin.2007. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah, Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Print, Murray. 1993. *Curriculum Development and Design*. Second Edition. New South Wales Australia: Allen & Unwim.
- Ramsay, Peter, et al. 1993. *Developing Partnerships: Collaboration Between Teachers and Parents*. Wellington New Zealand: Learning Media, Ministry of Education.
- Suwito. 2005. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Taba, Hilda. 1962. *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.